



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURJAHMAN, SP., MM**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN**
3. NHK : **408907**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.778.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/100 m2 di SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 20000 m2 di SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 7975 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 800 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
7. Tanah Seluas 1400 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 98.000.000
8. Tanah Seluas 8750 m2 di SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
9. Tanah Seluas 15000 m2 di SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
10. Tanah Seluas 10000 m2 di SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 21.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.



5.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **106.750.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.900.981****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. **1.911.650.981****III. HUTANG** Rp. **330.500.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.581.150.981**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Maret 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.